



## ANALISIS PENGARUH HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TANGGUNGJAWAB KELALAIAN DAN KESALAHAN PRODUSEN

Nurasiah Panjaitan<sup>1</sup>, Hasbi Febriansyah Sihotang<sup>2</sup>  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>12</sup>  
[nurasiahpanjaitan78@gmail.com](mailto:nurasiahpanjaitan78@gmail.com)<sup>1</sup> [hasbisihotang@gmail.com](mailto:hasbisihotang@gmail.com)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received: 13 Desember 2023  
Revised: 21 Desember 2023  
Accepted: 30 Desember 2023

#### Keywords

Consumer Protection, Producer Liability, Product Negligence, Product Error, Consumer Protection Law.

#### Kata Kunci

Perlindungan Konsumen,  
Tanggung Jawab Produsen,  
Kelalaian Produk, Kesalahan  
Produk, Hukum Perlindungan  
Konsumen.

### ABSTRACT

Consumer protection is an important aspect in a country's legal system which aims to protect the rights and interests of consumers in transactions. One aspect that is closely related to consumer protection is legal responsibility for producer negligence and errors. Producer negligence or errors can harm consumers and give rise to legal responsibility for producers. In this context, consumer protection law plays a very important role in determining standards and responsibilities of producers for the products they produce. therefore, the aim of this research is to investigate the impact of consumer protection laws on manufacturers' liability in the event of negligence or manufacturing defects. If the producer does not meet these standards, consumers have the right to demand compensation and create legal responsibility for the producer. Consumer protection laws serve to determine whether manufacturers have breached their obligations to consumers and whether consumers are entitled to compensation for losses suffered. We hope that you will gain a deeper understanding and increase your awareness of consumer rights in the legal context. This study is also expected to contribute to a deeper understanding of the development of consumer protection law and the dynamics of consumer-producer relations within the legal framework.

### ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam bertransaksi. Salah satu aspek yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab hukum atas kelalaian dan kesalahan produsen. kelalaian atau kesalahan produsen dapat merugikan konsumen dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi produsen. dalam konteks ini, undang-undang perlindungan konsumen memegang peranan yang sangat penting dalam menetapkan standar dan tanggung jawab produsen terhadap produk yang mereka produksi. oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak undang-undang perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produsen jika terjadi kelalaian atau cacat produksi. jika produsen tidak memenuhi standar tersebut, konsumen berhak menuntut ganti rugi dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi produsen. Undang-undang perlindungan konsumen berfungsi untuk menentukan apakah produsen telah melanggar kewajibannya kepada konsumen dan apakah konsumen berhak atas kompensasi atas kerugian yang diderita. Kami berharap Anda memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan meningkatkan kesadaran Anda tentang hak-hak konsumen dalam konteks hukum terkait kajian ini juga diharapkan

dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap perkembangan undang-undang perlindungan konsumen dan dinamika hubungan konsumen-produsen dalam kerangka hukum.

## **Pendahuluan**

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam bertransaksi (Samsul, Inosentius 2016: 153-166.). Undang-undang perlindungan konsumen memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari praktik komersial yang mungkin merugikan dan mengganggu kesehatan, keselamatan, atau hak-hak konsumen lainnya.

Salah satu aspek yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab hukum atas kelalaian dan kesalahan produsen. Kelalaian atau kesalahan produsen dapat merugikan konsumen dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi produsen. Dalam konteks ini, undang-undang perlindungan konsumen memegang peranan yang sangat penting dalam menetapkan standar dan tanggung jawab produsen terhadap produk yang mereka produksi.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak undang-undang perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produsen jika terjadi kelalaian atau cacat produksi. Penting untuk dipahami bahwa konsumen mempunyai hak untuk menerima produk yang aman dan berkualitas.

Undang-undang perlindungan konsumen menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh produsen agar produk mereka dianggap sesuai dan aman. Jika produsen tidak memenuhi standar tersebut, konsumen berhak menuntut ganti rugi dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi produsen. (Susanto, Happy 2008.)

Selain itu, konsep kelalaian produsen juga menjadi fokus penelitian ini. Kelalaian produsen dapat mencakup berbagai aspek seperti, desain yang buruk, informasi yang tidak memadai, atau kegagalan memberikan peringatan mengenai risiko yang terkait dengan produk.

Undang-undang perlindungan konsumen berfungsi untuk menentukan apakah produsen telah melanggar kewajibannya kepada konsumen dan apakah konsumen berhak atas kompensasi atas kerugian yang diderita. Melihat lebih dalam dampak undang-undang perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produsen atas kelalaian dan cacat

produksi untuk lebih memahami bagaimana perlindungan konsumen dapat berdampak pada praktik bisnis produsen.

Kami berharap Anda memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan meningkatkan kesadaran Anda tentang hak-hak konsumen dalam konteks hukum terkait kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap perkembangan undang-undang perlindungan konsumen dan dinamika hubungan konsumen-produsen dalam kerangka hukum.

## Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan penelitian ini menggunakan sejumlah wawancara untuk mempelajari dampak kelalaian konsumen dan perlindungan kesalahan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.

1. Judul Penelitian: “Analisis Pengaruh Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggungjawab Kelalaian Dan Kesalahan Produsen”
2. Tujuan Penelitian:
  - Mengkaji sejauh mana tingkat perlindungan konsumen mempengaruhi perilaku konsumen terhadap kekeliruan dan kekeliruan.
  - Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab konsumen.
  - Menganalisis dampak efektivitas perlindungan konsumen dalam mengurangi insiden kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh konsumen.
3. Kerangka Konseptual:
  - Variabel Independen
  - Tingkat Perlindungan Konsumen
  - Variabel terikat: Kesalahan konsumen dan tingkat kesalahannya.
4. Cara pengumpulan data:
  - Survei: Survei mengukur pemahaman konsumen tentang hak dan tanggung jawab.wawancara untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai pengalaman konsumen terhadap perlindungan konsumen.

- Tinjauan Pustaka: Meninjau literatur tentang perlindungan konsumen dan konsep psikologi konsumen yang dapat mempengaruhi tingkat kelalaian dan kesalahan.
5. Metode analisis data:
    - Analisis statistik deskriptif: Menjelaskan sebaran pemahaman konsumen dan derajat kesalahan atau kesalahannya.
    - Analisis korelasi: Mengevaluasi hubungan antara tingkat perlindungan konsumen dengan derajat kesalahan atau kelalaian konsumen.
    - Analisis Regresi: Memahami sejauh mana tingkat perlindungan konsumen dapat memprediksi tingkat kelalaian atau kesalahan konsumen.
  6. Sampel survei:
    - Konsumen dari berbagai latar belakang demografi dan tingkat pendidikan.
    - Fokus pada produk atau layanan tertentu yang rentan terhadap kelalaian atau kesalahan.
  7. Batasan Penelitian:
    - Terbatas pada wilayah atau negara tertentu.
    - Berfokus pada kelalaian dan kesalahan konsumen terkait penggunaan produk atau layanan tertentu.
  8. Implikasi dan Rekomendasi:
    - Membuat rekomendasi untuk meningkatkan atau memperkuat perlindungan konsumen berdasarkan temuan penelitian.
    - Memberikan bimbingan kepada penyedia produk atau jasa untuk meningkatkan pemahaman konsumen.
  9. Etika Penelitian :
    - Menjamin kerahasiaan identitas responden.
    - Mengikuti prinsip-prinsip etika penelitian dan memperoleh persetujuan etis jika diperlukan.
  10. Waktu Penelitian:
    - Tetapkan kerangka waktu yang realistis untuk pengumpulan dan analisis data.
    - Pastikan untuk menyesuaikan metode penelitian ini dengan situasi dan tujuan penelitian Anda.

## Pembahasan

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian(NEGLIGENCE) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan teori *negligence* yaitu: *the Failure to exercise The standard of Care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation* .berdasarkan teori ini kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen . (Sharon, Grace. 2018: 50-70). *Negligence* dapat dijadikan dasar gugatan manakala memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat
- Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata(*proximate cause*) dari kerugian yang timbul

Menurut (Muthiah, Aulia. 2016: 1-23.) di samping faktor kesalahan dan kelalaian produsen tuntutan ganti rugi tersebut juga diajukan dengan bukti-bukti lain yaitu:

1. pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
2. produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk Sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan.
3. konsumen menderita kerugian.
4. kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi konsumen.

Dalam sejarah pembentukan dan perkembangan hukum tanggung jawab produk, Terdapat 4 karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:

1. gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak.
2. gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak.
3. gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak.
4. gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian

Perkembangan hukum perlindungan konsumen telah menjadi salah satu aspek penting dalam sistem hukum modern yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.

Salah satu aspek perlindungan konsumen yang lebih dalam adalah mengatur tanggung jawab produsen kepada konsumen atas kesalahan dan kesalahannya. dalam konteks ini, peran undang-undang perlindungan konsumen sangat penting karena memberikan landasan hukum yang kuat bagi produsen untuk melakukan intervensi jika terjadi kelalaian atau kesalahan yang merugikan konsumen. (Gultom, Raynold Sebastian Hasiholan, and Muthia Sakti. 2023: 626-641.)

Artikel ini membahas dampak undang-undang perlindungan konsumen terhadap kelalaian produsen dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum.

1. Peran undang-undang perlindungan konsumen: Undang-undang perlindungan konsumen memberikan kerangka hukum yang menentukan hak dan kewajiban produsen dalam hubungannya dengan konsumen. hal ini mencakup hak atas informasi yang akurat, kualitas produk, dan kompensasi konsumen jika produk cacat menyebabkan kerusakan atau cedera. dengan demikian, undang-undang perlindungan konsumen menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menanggapi kelalaian atau kesalahan produsen.
2. Tanggung Jawab Produsen: Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan. produsen dapat bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh produknya jika terjadi kelalaian dalam desain, pembuatan, atau informasi yang diberikan kepada konsumen. undang-undang perlindungan konsumen memberikan dasar bagi produsen untuk menuntut kelalaian dan memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke pengadilan untuk meminta ganti rugi.
3. Kelalaian dan Ganti Rugi Produsen: Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggung jawab produsen atas produk cacat atau berbahaya. jika ditemukan kesalahan produksi atau desain, produsen mungkin diharuskan membayar kompensasi kepada konsumen yang terkena dampak. ketentuan ganti rugi ini menciptakan insentif bagi produsen untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan dan kualitas.
4. Standar Keamanan dan Mutu: Undang-undang perlindungan konsumen biasanya mencakup ketentuan mengenai standar keamanan dan mutu produk. produsen

diharapkan untuk mematuhi standar-standar ini dan kegagalan untuk mematuhinya akan dianggap kelalaian dari pihak produsen.undang-undang ini memberikan kewenangan kepada regulator untuk memastikan bahwa produsen mematuhi standar-standar ini, dan sanksi hukum dapat dikenakan jika produsen tidak mematuhinya.

5. Dampak terhadap inovasi produk: Undang-undang perlindungan konsumen penting untuk melindungi konsumen, namun terdapat juga kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap inovasi produk.beberapa produsen menghadapi beban peraturan yang tinggi, yang dapat memperlambat proses inovasi.oleh karena itu, dalam kerangka undang-undang perlindungan konsumen, harus ada hubungan yang seimbang antara perlindungan konsumen dan peningkatan inovasi.
6. Peran pengadilan dan penyelesaian sengketa: Undang-undang perlindungan konsumen memainkan peranan penting dalam memberikan konsumen akses terhadap pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa.hal ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut produsen jika terjadi kerugian karena kelalaian atau kesalahannya.pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa ini berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk memastikan bahwa produsen bertanggung jawab.

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting hukum yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi komersial.Undang-undang perlindungan konsumen mempunyai dampak yang signifikan terhadap kelalaian produsen dan tanggung jawab kerugian.( MUAROFAH, ISMIATUL. , 2021.)

Beberapa dampaknya tercantum di bawah ini:

1. Meningkatkan kualitas produk:

Untuk memenuhi persyaratan perlindungan konsumen yang sah, produsen cenderung lebih berhati-hati dalam pengembangan, produksi, dan pemasaran produknya.standar kualitas yang lebih tinggi diharapkan karena produsen perlu memastikan bahwa produk mereka aman, berfungsi sesuai janji, dan memenuhi harapan konsumen.

2. Tanggungjawab produk:

Undang-undang perlindungan konsumen sering kali mencakup prinsip tanggung jawab produk yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas keamanan dan kualitas produk mereka.jika konsumen menderita kerugian akibat cacat produk, produsen dapat dituntut secara hukum.

3. Informasi yang jelas dan akurat:

Produsen mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen mengenai produknya. Kegagalan memberikan informasi atau menyesatkan konsumen dapat dianggap sebagai pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. (Susanti, Dyah Ochtorina, and Nuzulia Kumala Sari. 2022: 461-492.)

4. Hak konsumen untuk menuntut:

Undang-undang perlindungan konsumen memberikan konsumen hak untuk menuntut produsen atas kerugian atau cedera yang disebabkan oleh produk yang tidak aman atau cacat.

5. Inspeksi dan sertifikasi produk:

Produsen harus menjalani proses inspeksi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

6. Hukuman dan sanksi:

Undang-undang perlindungan konsumen sering kali memberikan sanksi dan hukuman terhadap produsen yang melanggar peraturan. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya.

7. Peraturan dan pengawasan pemerintah:

Pemerintah pada umumnya mempunyai peran dalam mengatur dan memantau kepatuhan produsen terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa produsen mematuhi standar yang ditetapkan untuk melindungi konsumen.

Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen, produsen diharapkan dapat menunjukkan integritas yang lebih besar dalam operasionalnya, meningkatkan kualitas produknya, dan memastikan bahwa konsumen menerima informasi yang jujur dan akurat tentang produk yang mereka beli.

Hal ini sejalan dengan tujuan kami untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan aman bagi konsumen. Menganalisis dampak undang-undang perlindungan konsumen terhadap kelalaian dan malpraktik produsen merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks hukum komersial dan perlindungan konsumen.

Berikut adalah beberapa pendapat yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan evaluasi aspek-aspek utama perdebatan ini:

1. Perlindungan konsumen sebagai prioritas utama

Undang-undang perlindungan konsumen adalah demi kepentingan konsumen. hal ini menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya melindungi Analisis terperinci mengenai dampak undang-undang ini dapat menunjukkan sejauh mana perlindungan ini membantu mengurangi risiko dan kerugian yang mungkin diderita konsumen karena kelalaian atau kesalahan produsen.

2. Tanggung jawab produsen

Pembahasan harus mencakup uraian yang jelas mengenai tanggung jawab produsen dalam konteks undang-undang perlindungan konsumen. hal ini dapat mencakup komitmen untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat, memastikan keamanan produk, dan menanggapi keluhan konsumen dengan tepat. Analisis ini membantu produsen memahami tanggung jawab apa yang mereka miliki terhadap produk yang mereka hasilkan.

3. Dampak terhadap reputasi dan kepercayaan konsumen

Analisis harus mempertimbangkan dampak undang-undang ini terhadap reputasi produsen. Kesalahan dan kelalaian yang merugikan konsumen dapat merusak citra produsen, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan penjualan. Undang-undang perlindungan konsumen dapat dilihat sebagai alat untuk meningkatkan integritas dan kualitas dalam dunia usaha

4. Peraturan dan Kepatuhan:

Analisis tersebut harus mencakup tinjauan terhadap peraturan yang mengatur hubungan produsen-konsumen. aspek kunci dari diskusi ini adalah bagaimana produsen harus beroperasi dengan patuh dan bagaimana mereka dapat memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen.

5. Litigasi dan Sanksi

Penting untuk menilai bagaimana undang-undang perlindungan konsumen memberikan dasar untuk mengajukan tuntutan dan memperoleh kompensasi ketika konsumen dirugikan oleh produk cacat. Sanksi terhadap produsen yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen juga perlu dipertimbangkan.

6. Aspek hukum internasional dan komparatif

Dalam konteks globalisasi, analisis juga dapat mempertimbangkan perbedaan dan persamaan undang-undang perlindungan konsumen di berbagai negara. hal ini memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan perbandingan ketika menangani kelalaian produsen dan tanggung jawab cacat.

Perlu diingat bahwa analisis apa pun harus mempertimbangkan kerangka hukum yang berlaku di wilayah tertentu dan memasukkan faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi penerapan undang-undang perlindungan konsumen dan tanggung jawab produsen. (Rumondang, Astri, Acai Sudirman, and Samsider Sitorus:2020).

### **Kesimpulan**

Dampak undang-undang perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produsen atas kelalaian dan malpraktik adalah signifikan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi produsen untuk melakukan intervensi jika terjadi kelalaian atau kesalahan dan memberikan perlindungan yang diperlukan kepada konsumen.

Namun, untuk memastikan bahwa produsen dapat terus mengembangkan produk yang inovatif dan aman bagi konsumen, keseimbangan harus dicapai antara melindungi konsumen dan mendorong inovasi.

### **Daftar Pustaka**

- Gultom, Raynold Sebastian Hasiholan, and Muthia Sakti. "Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4.3 (2023): 626-641.
- MUAROFAH, ISMIATUL. *Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Transaksi Online di Aplikasi Lazada (Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)*. Diss. Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, 2021.
- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7.2 (2016): 1-23.
- Rumondang, Astri, Acai Sudirman, and Samsider Sitorus. "Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen." (2020).
- Samsul, Inosentius. "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4.2 (2016): 153-166.
- Sharon, Grace. "Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 7.1 (2018): 50-70.

*Nurasiah Panjaitan, Hasbi Febriansyah Sihotang: Analisis Pengaruh Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggungjawab Kelalaian Dan Kesalahan Produsen*

---

Susanti, Dyah Octorina, and Nuzulia Kumala Sari. "PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN REKAYASA GENETIKA: RASIONALITAS DAN PROSPEK." *Veritas et Justitia* 8.2 (2022): 461-492.

Susanto, Happy. *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia, 2008.